



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554-21825 fax. (0751) 21554

Website : <http://www.disdik.padang.go.id>

Nomor : 421/438.19/DP.Sekre.1/2014
Lampiran : -
Perihal : Larangan Pemungutan Iyuran dan Sumbangan

Padang, 2 Oktober 2014

Kepada Yth.

1. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kota Padang

di -

P a d a n g

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Draf/rancangan regulasi Peraturan Walikota Padang yang mengatur Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Larangan Pungutan Uang Pembangunan dan Uang Komite oleh SD/SMP/SMA/SMK Negeri se-Kota Padang, yang saat ini sudah dalam tahap proses finishing.
2. Sambil menunggu ditanda tangannya draf Perwako dimaksud, semua Kepala SD/SMP/SMA/SMK Negeri Kota Padang juga **DILARANG**, mengambil kebijakan lain untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa/ orangtua/wali murid.
3. Untuk mengatasi biaya investasi dan biaya operasional SD/SMP/SMA/SMK Negeri yang selama ini turut dibiayai dari uang pembangunan/sumbangan komite, untuk selanjutnya akan dibiayai dengan dana BOS yang bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari APBD Kota Padang dalam bentuk BOSDA.
4. Oleh karena itu semua SD/SMP/SMA/SMK Negeri Kota Padang terhitung mulai awal tahun ajaran 2014/2015 **DILARANG** melakukan pungutan uang pembangunan/sumbangan komite dalam bentuk apapun kepada siswa/orangtua/wali murid.
5. Khusus kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan diminta untuk menyampaikan informasi ini dan mengawasi pelaksanaannya pada SD di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Indang Dewata, M.Si.
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Padang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Padang (sebagai laporan)
3. Inspektur Kota Padang (sebagai laporan)
4. Arsip.